



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa inovasi daerah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja dan daya saing daerah, untuk itu maka perlu dirumuskan dalam *roadmap* penguatan sistem inovasi daerah;
- b. bahwa penyusunan *roadmap* penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Bangli harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama Menteri Dalam Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Bupati menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten yang salah satunya tercantum dalam *Roadmap* Penguatan SIDa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah

7. *Roadmap* Penguatan SIDA adalah dokumen kebijakan yang memuat kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, kondisi SIDA yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA, fokus dan program prioritas SIDA; dan rencana aksi penguatan SIDA
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018–2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Bali adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai tahun 2023;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bangli adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bangli adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bangli adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah; dan
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

Pasal 2

Tujuan Penguatan SIDA yaitu terwujudnya transformasi digital pelayanan publik Daerah untuk menuju Bangli Era Baru.

Pasal 3

Sasaran penguatan SIDA Kabupaten Bangli yaitu:

- a. meningkatnya Pelayanan Jaringan Telekomunikasi;
- b. meningkatnya Kuantitas, Kualitas, Dan Integrasi Data Digital;
- c. meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Strategis; dan
- d. meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan publik strategis berbasis digital.

BAB II

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021-2026

Pasal 4

Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Kondisi SIDA saat ini; |
| BAB II | Kondisi SIDA Kabupaten Bangli Tahun 2026; |
| BAB III | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026; |
| BAB IV | Fokus, Prioritas dan Program. |

Pasal 5

Strategi yang dikembangkan dalam upaya mewujudkan penguatan SIDA di Kabupaten Bangli, yaitu:

- a. memperluas cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi dan informasi (kabel maupun nirkabel);
- b. meningkatkan perkembangan usaha jasa telekomunikasi dan informasi;
- c. mempercepat migrasi dan konversi data manual menuju data digital untuk seluruh perangkat daerah
- d. mendorong pemanfaatan data tunggal bagi seluruh perangkat daerah;
- e. menciptakan ekosistem pemerintahan Daerah berbasis sistem informasi digital;
- f. menciptakan iklim yang kondusif terhadap investasi berbasis digital;
- g. mengembangkan pelayanan publik berbasis digital; dan
- h. mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara nyata oleh masyarakat dalam pelayanan publik strategis.

Pasal 6

Isi beserta uraian *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (W/a)

NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
ROADMAP PENGUATAN
SISTEM INOVASI DAERAH
(SIDa) KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2021-2026

ISI DAN URAIAN *ROADMAP* PENGUATAN SIDa
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

TAHUN 2023

BAB I

KONDISI SIDA SAAT INI

1.1 POSISI KABUPATEN BANGLI DALAM INDEKS INOVASI NASIONAL

Upaya untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah menjadi perhatian yang penting, mengingat inovasi daerah dapat mendukung pengembangan wilayah di daerah berdasarkan pada keunggulan dan kompetisi daerah. Hal ini merupakan salah satu cara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi Kabupaten Bangli. Melihat peringkat dalam indeks inovasi nasional saat ini sangat penting untuk merancang dan merumuskan inovasi Kabupaten Bangli kedepannya. Untuk peringkat nasional Kabupaten Bangli saat ini berapa pada peringkat 280 dalam indeks inovasi daerah. Bila dibandingkan dengan hasil tahun 2021 indeks inovasi daerah kabupaten naik signifikan pada tahun 2022, dari rangking 400 ke rangking 280 kategori kabupaten inovatif, dari yang tadinya masuk dalam kategori kabupaten kurang inovatif.

Indikator penguatan SIDA Kabupaten Bangli dari indeks inovasi nasional dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.

Penjelasan Indikator Inovasi Pada Satuan Inovasi Daerah

NO	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL	RANGKING
1	Regulasi Inovasi	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	280
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasidaerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)	280
3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)	280
4	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	280

NO	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL	RANGKING
5	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	280
6	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah Dituangkan dalam program pembangunan daerah	280
7	Keterlibatan actor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	280
8	Pelaksana Inovasi Daerah	Penetapan Tim pelaksana inovasi daerah	280
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	280
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	280
11	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book	280
12	Kemudahan Informasi Layanan	Kemudahan Mendapatkan Informasi Layanan	280
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	280
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 tahun terakhir	280
15	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)	280
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)	280
17	Kecepatan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.	280
18	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir)	280
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	280
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	280

1.2 KELEMBAGAAN KELITBANGAN KABUPATEN BANGLI

Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Riset dan Inovasi Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, merupakan Badan Tipe C dengan Susunan Organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. UPTD.

Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki jumlah SDM sebanyak 9 orang dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Eselon II : 1 Orang
- b. Eselon III : 1 Orang
- c. Eselon IV : 2 Orang
- d. Fungsional : 0 Orang
- e. Golongan III : 5 Orang
- f. Golongan II : 0 Orang

Dalam menjalankan tugasnya Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki 2 Kegiatan dengan anggaran yang berasal dari:

- a. APBD 2023 sebanyak Rp. 466.500.000.000
- b. Refocusing Anggaran Rp. 100.000.000

1.3 BUDAYA INOVASI DAERAH

Dalam perumusan inovasi daerah pemanfaatan telepon seluler menjadi salah satu factor yang perlu dipertimbangkan karena melihat saat ini hampir seluruh kegiatan dapat dilakukan melalui telepon seluler. Hal ini juga disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang memaksa seluruh kegiatan dilakukan secara daring/online dan membatasi kegiatan yang dapat menyebabkan kerumunan masa berlebihan. Maka dari pada itu dalam perumusan inovasi daerah ini harus juga memanfaatkan penggunaan aplikasi yang dapat memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Bangli.

Namun dalam penggunaan telepon seluler Kabupaten Bangli termasuk dalam 5 Kabupaten terendah dalam penggunaan telepon seluler. Hal ini juga disebabkan karena masih kurangnya jaringan internet yang ada di Kabupaten Bangli. Di Provinsi Bali, Kabupaten Bangli termasuk dalam 5 terendah dalam penggunaan jaringan internet.

1.4 KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

Kabupaten Bangli saat ini telah memiliki beberapa kebijakan terkait inovasi yang telah berjalan.

Berikut kebijakan terkait inovasi yang ada di Kabupaten Bangli

- a. PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel & Pajak Restoran Secara Elektronik
- c. PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021
- d. PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- e. PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 22 TAHUN 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- f. INSTRUKSI BUPATI BANGLI NOMOR 188.5/12/2020 tentang Penyebarluasan Informasi Objek Wisata Kabupaten Bangli
- g. PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- h. PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah
- i. PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Kepada Camat
- j. PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Peserta Didik
- k. KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 550/359/2021 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik/Digital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
- l. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- m. PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 tentang Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
- n. PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 tentang Program Layanan Cepat 24 Jam Bangli Era Baru

1.5. INOVASI YANG SUDAH BERJALAN

Kabupaten Bangli saat ini sudah memiliki 129 aplikasi yang sudah berjalan dan digunakan sebagai inovasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun OPD yang telah memiliki aplikasi sebagai media pelayanan yaitu:

Tabel 1.5.
Aplikasi yang telah berjalan di Kabupaten Bangli

No	Perangkat Daerah	Jumlah Aplikasi
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	7
2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	17
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
4	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	18
5	Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD)	8
6	Kantor Kecamatan	3
7	Dinas PUPR PERKIM	1
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2
9	Kantor Pengadaan Barang dan Jasa	6
10	BPBD	8

11	Badan Hukum dan HAM	1
12	Bagian Organisasi	3
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PPKB	1
14	Dinas Kesehatan	18
15	Bagian Umum	1
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2
17	Inspektorat	2
18	Badan Kepegawaian dan PSDM	2
19	Dinas Koperasi, UMKM, NAKERTRANS	4
20	BAPPEDA	4
21	Bagian Pembangunan	1
22	RSU Bangli	15
23	DISKOMINFOSAN	1
24	DISDUKCAPIL	7

Salah satu contoh inovasi yang telah berjalan di Kabupaten Bangli adalah SIPANDU. SIPANDU merupakan metode registrasi administrasi penduduk online yang berbasis web yang belum banyak digunakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lain di Indonesia. Aplikasi SIPANDU memiliki kelebihan yaitu:

1. Berbasis Online (dapat diakses kapan saja dan dimana saja)
2. Cepat, tetap, akurat dan murah
3. Sulit untuk dimanipulasi karena menggunakan aplikasi
4. Bias dipertanggungjawabkan legalitasnya
5. Transparan
6. Menggunakan Notifikasi otomatis di aplikasi WhatsApp

Aplikasi SIPANDU ini juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini seperti menekan terjadinya kerumunan dalam pengurusan administrasi kependudukan, memangkas birokrasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dalam administrasi kependudukan.

1.6. USULAN INOVASI DAERAH

Dalam penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah ini sangat diperlukan adanya usulan-usulan dari perangkat daerah terkait agar dapat memaksimalkan Inovasi yang akan dirancang dalam membantu pengembangan daerah Kabupaten Bangli. Adapun usulan-usulan inovasi daerah dari perangkat daerah terkait yaitu:

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

- a. Peningkatan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi
- b. Pengembangan sistem informasi yang lebih user-friendly menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Kab Bangli yang belum fasih dengan teknologi

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli

- a. Inovasi untuk menumbuhkan koperasi di sektor riil
- b. Digitalisasi Koperasi
- c. Pendataan UMKM Berbasis Aplikasi Online
- d. Sistem Pelayanan Ketenagakerjaan Jemput Bola (SIPEKAK JEMPUT BOLA)

1.7. PERMASALAHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KELITBANGAN

Dalam pemanfaatan teknologi sebagai bagian dalam pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Bangli, terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat perkembangan inovasi daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Cakupan layanan jaringan
Masih ada 15% wilayah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi
- b. Penetrasi Internet Rumah Tangga
Hanya 47% Rumah Tangga yang mengakses internet
- c. Pemanfaatan website pemerintah
Belum optimalnya pemanfaatan website pemerintah dan perangkat daerah serta informasi yang disebar luaskan tidak selalu diupdate
- d. Kualitas SDM urusan IT
Kemampuan SDM ASN dalam penguasaan IT masih rendah dan belum adanya masterplan TIK
- e. Unit Pengaduan Online
Belum adanya unit pengaduan online terpadu

Selain dalam pemanfaatan Teknologi dalam pengembangan inovasi daerah, Kabupaten Bangli juga memiliki beberapa permasalahan terkait penelitian dan pengembangan. Permasalahan kelitbangan yang menonjol adalah masih belum optimalnya hasil kelitbangan yang bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan permasalahan sumber daya manusia yang memadai, yang berasal dari belum adanya tenaga fungsional kelitbangan, sehingga pelaksanaan kegiatan kelitbangan masih mengandalkan kerjasama dengan universitas/lembaga penelitian.

1.8. POTENSI DAN PERMASALAHAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI

Kabupaten Bangli memiliki potensi inovasi yang dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Berikut potensi terkait inovasi yang telah dimiliki oleh Kabupaten Bangli.

- a. Penetapan Aplikasi Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Bangli
Kabupaten Bangli sudah memiliki kebijakan dalam pemanfaatan aplikasi elektronik dalam menjalankan pelayanan public.
- b. Program Layanan Cepat 24 Jam Bangli Era Baru
Adanya terobosan layanan cepat 24 jam yang memanfaatkan Hotline, Sosial Media, dan WA.
- c. Kebijakan TTD Elektronik
Dapat dikembangkan sebagai cikal bakal paperless policy di Kabupaten Bangli.

- d. Aplikasi Sipandu Sebagai Benchmark Pengembangan Aplikasi Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki aplikasi unggulan yang sudah berjalan yaitu SIPANDU yang dikembangkan oleh DISDUKCAPIL. Pemanfaatan aplikasi SIPANDU dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pengembangan aplikasi pelayanan publik lainnya di Kabupaten Bangli.

Selain memiliki potensi yang mumpuni dalam pengembangan inovasi daerah, Kabupaten Bangli juga memiliki permasalahan terkait Inovasi Daerah yaitu:

- a. Rendahnya Ranking Indeks Inovasi Permasalahan multisektor dan multidimensi.
- b. Kualitas SDM Angka IPM Kab Bangli merupakan yang terendah kedua setelah Kab Karangasem dan memiliki Pendapatan Perkapita terendah kedua.
- c. Rendahnya Penetrasi Internet & Gawai Akses terhadap informasi dan jaringan inovasi yang rendah serta Sistem jaringan telekomunikasi belum optimal.
- d. Rendahnya Dukungan Kebijakan Kebijakan yang menjamin dan mendukung inovasi jumlahnya masih rendah
- e. Budgeting Atau Penganggaran.
Upaya inovasi terbentur anggaran yang minim.
- f. Keterbatasan SDM
Jumlah SDM pada BRIDA Kab Bangli belum cukup dalam menjalankan tupoksi kelitbangan daerah serta kegiatan kelitbangan masih bekerjasama dengan universitas/ perguruan tinggi.
- g. Rendahnya Jumlah Komunitas Inovasi
Komunitas yang mendorong inovasi daerah belum terbentuk.

BAB II

KONDISI SIDA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bangli akan diimplementasikan pada periode tahun 2021-2026 atau selama 5 tahun. Sehingga kondisi SIDA yang ingin dicapai di Kabupaten Bangli adalah kondisi SIDA pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2026. Jangka waktu implementasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bangli mengikuti jangka waktu dalam RPJMD Semesta Berencana yaitu Tahun 2021-2026. Hal ini menyesuaikan dengan amanat Pasal 7 dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012, dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah bahwa Roadmap Penguatan SIDA diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD. Karena adanya amanat integrasi tersebut maka jangka waktu implementasi kebijakan SIDA mengikuti jangka waktu RPJMD. Apabila RPJMD sudah berjalan maka Roadmap SIDA digunakan sebagai bahan untuk perubahan RPJMD. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bangli tengah menyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah terpilih. Oleh karenanya, Roadmap SIDA Kabupaten Bangli akan menjadi input dalam penyempurnaan Ranperda RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026.

2.1. KERANGKA STRATEGIS INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI

Kerangka strategis Inovasi Daerah merupakan batasan sekaligus pembentuk kondisi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bangli yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan. Karena Roadmap SIDA wajib untuk diintegrasikan dengan RPJMD maka kerangka strategis Inovasi Daerah menyesuaikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

2.1.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Penyusunan visi dan misi Kabupaten Bangli mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang terukur. maka visi Kabupaten Bangli tahun 2021- 2026, yaitu:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KABUPATEN BANGLI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA KITA WUJUDKAN BANGLIERA BARU

Yang mengandung makna;

“Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Bangli Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bangli Yang Sejahtera Dan Bahagia, *Sekala Niskala* Menuju Kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bangli Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi”.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bangli yaitu : *Krama* Bangli/SDM (*Pawongan*); Alam Bangli (*Palemahan*); dan Kebudayaan Bangli yang mencakup agama, tradisi, seni dan adat istiadat (*Parahyangan*). Ketiga hal inilah yang disebut *Prakerti* (unsur utama) dalam membangun Bangli.

a. Pembangunan Krama Bangli/SDM (*Pawongan*) adalah pembangunan SDM Bangli yang “Cerdas (*Pradnyan*)” dan “Unggul”.

- 1) SDM cerdas yang dimaksud adalah bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi Krama Bangli juga harus cerdas spritual, cerdas emosional dan cerdas sosial. Singkatnya adalah membangun SDM yang bijaksana, jujur, berakarakter dan berbudaya. Caranya dengan membenahi pendidikan (kurikulum) yaitu pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti menjadi

pendidikan yang utama.

- 2) SDM unggul adalah SDM yang kompetitif / berdaya bersaing, visioner, kreatif, inovatif, produktif dan terbuka dengan senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan; sehingga melahirkan Krama Bangli yang “metaksu”
- b. Pembangunan Alam Bangli (*Palemahan*) adalah pembangunan untuk mewujudkan Bangli yang BANGLI (Bersih, Aman, Nyaman, Gairah, Lestari, Indah).
- c. Pembangunan kebudayaan Bangli yang mencakup agama, tradisi, seni dan adat istiadat (*Parahyangan*).

Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan Krama Bangli yang berkebudayaan tinggi. Sebagaimana halnya manusia pada umumnya, Krama Bangli memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat mendasar/wajib, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bangli kedepan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bangli yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan alam, Krama (Manusia) dan Kebudayaan Bali (Budaya dan Adat Istiadat Bangli); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bangli dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bangli di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bangli dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya: *Atita* (masa lalu), *Wartamana* (Masa Kini), dan *Nagata* (Masa Datang), yaitu kondisi Bangli di masa lalu, kondisi Bangli di masa kini dan kondisi Bangli di masa datang. Bangli

di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kerajaan Bangli, sebagai masa romantika; Bangli di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bangli, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa dinamika; dan Bangli di masa datang merupakan suatu kondisi baru (Sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bangli di masa lalu, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bangli di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bangli menuju Era Baru, yaitu suatu

Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bangli yang *Kawista*, Bangli *kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama: dimensi pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia), dan Budaya Bangli (*Genuine*); Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bangli dalam berbagai aspek kehidupan; dan Dimensi ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Dimensi ketiga merupakan suatu manajemen resiko (*risk management*) dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan dan tantangan baru di masa yang akan datang.

Salah satu sorotan (*highlight*) dalam perumusan kondisi inovasi daerah yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah frasa *Bangli Era Baru*. Bangli Era Baru adalah Bangli yang mampu mengantisipasi dan menghadapi permasalahan dan tantangan baru yang muncul akibat dinamika sosial-politik-ekonomi nasional, dan global. Menuju Bangli Era Baru berarti menuju sebuah titik dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara masa lalu dan masa depan. Untuk mencapai kondisi atau titik tersebut maka pemerintah bersama segenap rakyat Kabupaten Bangli harus segera bertindak dan bergerak dengan memaksimalkan potensi dan peluang yang ada. Untuk mencapai kondisi Bangli Era Baru maka dapat dibantu melalui penerapan kebijakan inovatif daerah maupun inovasi daerah yang berasal dari masyarakat.

Bangli Era Baru juga dapat diartikan sebagai Bangli yang dapat beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan dunia khususnya perkembangan teknologi informasi dalam mengembangkan diri, berpartisipasi dalam kancah perekonomian nasional maupun global, hingga menetapkan standar tertentu dalam menjalankan perikehidupannya. Bangli Era Baru juga mengejawantahkan *branding* baru yang dapat memberikan Kabupaten Bangli tempat tersendiri dalam paradigma pembangunan Provinsi Bali atau bahkan menjadi tolok ukur bagi Kabupaten/Kota lainnya dalam menjalankan pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan yang inovatif dan produktif dengan teknologi informasi.

2.1.2. Misi Pembangunan Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Dalam mewujudkan VISI tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) MISI pembangunan sesuai filosofi *Sarining Padmabhawana* yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bangli sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bangli, melalui kemandirian pangan, dan

- mengembangkan pusat ekonomi kerakyatan.
- Misi 2.** Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan databased riwayat kesehatan bagi seluruh *Krama* Bangli.
 - Misi 3.** Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta mengembangkan sistem pendidikan berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Pasraman* di Desa Adat.
 - Misi 4.** Mengembangkan sistem jaminan sosial terpadu, penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi seluruh *Krama* Bangli.
 - Misi 5.** Memajukan adat, tradisi, seni dan budaya melalui upaya pelestarian, perlindungan serta pembinaan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Agama Hindu.
 - Misi 6.** Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis budaya.
 - Misi 7.** Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis TIK yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah
 - Misi 8.** Mewujudkan kehidupan *Krama* Bangli yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
 - Misi 9.** Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi untuk mendukung akses dan mutu pelayanan publik.

Berdasarkan 9 misi pembangunan daerah tersebut, akan dirumuskan pula mengenai bidang yang akan menjadi fokus atau prioritas dalam penguatan SIDA Kabupaten Bangli. Menyesuaikan dengan kebutuhan penguatan Inovasi Daerah serta mengembangkan potensi kondisi SIDA saat ini maka fokus penguatan SIDA Kabupaten Bangli akan dilakukan pada bidang:

- a. Perijinan dan Investasi
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan
- d. Pertanian
- e. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- f. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kerangka strategis dalam penguatan SIDA Kabupaten Bangli di tahun 2026 adalah pengembangan Teknologi dan Informasi pada kelima bidang yang menjadi fokus penguatan Inovasi Daerah agar dapat mencapai titik Bangli Era Baru sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi Pembangunan Kabupaten Bangli.

2.2. KONDISI INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI YANG AKAN DICAPAI TAHUN 2026

Melihat pada kondisi sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Bangli yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bali yaitu IPM kedua terendah, salah satu Pendapatan Perkapita terendah, penetrasi internet kedua terendah, pemanfaatan gawai (telepon seluler dan computer) rendah, dan Pertumbuhan ekonomi kedua terendah (dalam kondisi normal) maka akan sangat sulit untuk mengharapkan bahkan mendorong inovasi yang berasal dari masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bangli masih berkutat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan belum berada pada tahap untuk memiliki visi melakukan inovasi dalam memudahkan kehidupannya. Oleh karenanya inovasi daerah yang diharapkan dapat terealisasi hingga tahun 2026 adalah inovasi daerah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bangli. Terlebih pelaksanaan inovasi dalam pemerintahan daerah sudah diamanatkan dalam undang-undang.

Pasal 386 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau dalam kata lain pelayanan publik. Diharapkan melalui inovasi penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bangli dapat meningkatkan kualitas SDM penduduknya dan semakin mendekatkan mereka dengan penggunaan Teknologi Informasi. Sehingga Bangli Era Baru dapat segera terwujud.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangli serta kondisi kesiapsediaan SDM masyarakat dan aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Bangli, maka kondisi inovasi daerah Kabupaten Bangli yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut.

BANGLI YANG TERDIGITALISASI DAN TERINTEGRASI

Bangli yang terdigitalisasi adalah Kabupaten Bangli dengan sistem pemerintahan yang telah bermigrasi dari skema manual menuju skema digital. Pada tahun 2026 seluruh skema pelayanan publik sudah dapat dilakukan secara daring yang bertumpu pada Sistem Informasi. Seluruh data-data publik yang dimiliki oleh Perangkat Daerah sudah berbentuk digital dan dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Data-data tertentu dapat tidak dibuka kepada publik, dikelola, dan dibagi bersama sesuai dengan kepentingan masing-masing perangkat daerah secara daring. Proses pertukaran informasi dilakukan antar instansi via layar computer, begitu juga dengan pelaksanaan rapat, pemaparan hasil kegiatan, dan diskusi internal dilaksanakan secara teleconference.

Pelayanan publik dilakukan via aplikasi dan sistem informasi. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik di mana saja dan kapan saja, tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik, antrean panjang, ataupun proses birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi dapat dipangkas dan dilakukan secara transparan. Proses administrasi dapat diawasi langsung oleh masyarakat dan masyarakat dapat memberikan feedback atau pengaduan secara daring dan real time. Pemerintah Daerah memanen data-data masyarakat yang berasal dari penggunaan aplikasi dan sistem informasi secara real time (Big Data)

yang kemudian digunakan sebagai decision making tools. Penyusunan kebijakan menjadi lebih presisi dan lebih cepat karena ketersediaan data yang akurat dan selalu mutakhir.

Bangli yang terdigitalisasi juga berarti Bangli yang lebih bersih dan lebih bersahabat pada upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan. Sistem pemerintahan yang sudah sepenuhnya digital akan mengurangi kebutuhan akan kertas dan kebutuhan akan pergerakan dengan menggunakan kendaraan. Semuanya dalam jangka panjang akan mengurangi emisi gas karbon, dan membantu mengurangi penebangan hutan. Diharapkan juga dengan Bangli yang sudah terdigitalisasi akan memicu kabupaten/kota lainnya untuk mengikuti jejak Kabupaten Bangli dan mengintegrasikan sistem informasi pada masing-masing kabupaten/kota yang membentuk Sistem Informasi Kolektif Provinsi Bali.

Bangli yang terintegrasi adalah Bangli yang pelaksanaan kinerja Perangkat Daerahnya telah terintegrasi satu dengan lainnya. Seluruh data perangkat daerah telah terkoneksi dan terpadu untuk menciptakan Bangli Satu Data dan Satu Peta. Tidak ada lagi perbedaan data yang dirilis antar perangkat daerah. Tidak ada lagi kesalahan penyusunan kebijakan atau miss management pada bidang tertentu akibat perbedaan data yang digunakan. Semua perangkat daerah menyusun kebijakan berdasarkan satu data dan satu peta.

Bangli Yang Terdigitalisasi dan Terintegrasi adalah kondisi yang paling mungkin dan paling strategis untuk dapat diwujudkan dalam waktu 5 tahun mendatang demi menuju Bangli Era Baru. Kondisi saat ini dimana antar perangkat daerah masih melaksanakan pembangunan secara parsial dan tertutup menyebabkan perencanaan dan evaluasi dilakukan secara parsial yang menyebabkan terjadinya pembangunan yang tidak tepat sasaran, penganggaran yang berlebih, rendahnya keterpaduan antar sektor, dan SDM yang tidak merata.

Kondisi yang akan diwujudkan dalam Bangli Yang Terdigitalisasi dan Terintegrasi, adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Penetrasi Internet

Seperti yang sudah diulas pada bab sebelumnya, bahwa penetrasi internet di Kabupaten Bangli merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Bali. Sehingga kondisi yang akan terwujud di tahun 2026; Bangli Terdigitalisasi dan Terintegasi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan jaringan internet
- b. Peningkatan persentase rumah tangga yang sudah memanfaatkan internet
- c. Kemudahan perijinan usaha untuk jasa layanan telekomunikasi & informasi

2. Digitalisasi & Integrasi Data Perangkat Daerah

Kondisi yang ingin terwujud dengan Digitalisasi dan Integrasi data perangkat daerah di Kabupaten Bangli adalah:

- a. Sebagian besar data manual pada seluruh perangkat daerah sudah terkonversi ke digital
- b. Data dukcapil, perijinan dan investasi, tata ruang, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan pendidikan sudah seluruhnya terdigitalisasi
- c. Data dukcapil, perijinan dan investasi, tata ruang, kesehatan,

pertanian, pariwisata, dan pendidikan sudah seluruhnya terintegrasi

3. Pelayanan Publik Yang Lebih Efektif dan Efisien

Kondisi yang ingin dicapai: optimalisasi dan peningkatan layanan publik yang dilaksanakan secara daring terutama urusan dukcapil, perijinan, investasi, tata ruang, pertanian, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Seluruh perangkat daerah diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, namun selama 5 tahun kedepan fokus dilakukan pada perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis bagi Kabupaten Bangli yaitu fungsi perijinan dan investasi, kependudukan dan pencatatan sipil, tata ruang, pertanian, pariwisata (termasuk ekonomi kreatif), kesehatan, dan pendidikan.

4. Masyarakat Yang Dekat Dengan Dunia Digital

Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Peningkatan traffic pemanfaatan pelayanan publik secara daring
Semakin meningkatnya traffic pemanfaatan sistem informasi maupun aplikasi pelayanan publik oleh masyarakat Kabupaten Bangli mengindikasikan bahwa masyarakat sudah semakin bergantung dan terbiasa dengan dunia digital. Masyarakat yang sudah fasih memanfaatkan teknologi informasi adalah masyarakat yang secara sumberdaya sudah fasih untuk berinovasi. Semakin banyak inovasi yang dihasilkan mengindikasikan semakin baik taraf hidup masyarakat dan semakin mudahnya masyarakat dalam beraktivitas.
- b. Terbentuknya komunitas/desa wisata berbasis digital
Dengan semakin dekatnya masyarakat Kabupaten Bangli dengan dunia digital maka akan dengan sendirinya terbentuk komunitas-komunitas digital di dalam masyarakat. Komunitas ini akan saling sharing, membantu, dan mendorong anggotanya serta komunitas lainnya untuk berkiprah dan berinovasi demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik, efektif, dan efisien. Pemerintah Kabupaten Bangli perlu memfasilitasi dan mendorong terbentuknya komunitas digital desa wisata dan jejaringnya guna membantu promosi, inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan wisata di masing-masing desa. Mengingat desa-desa di Kabupaten Bangli banyak yang dikembangkan sebagai desa wisata.

5. Platform Kebijakan Bangli Satu Peta Satu Data

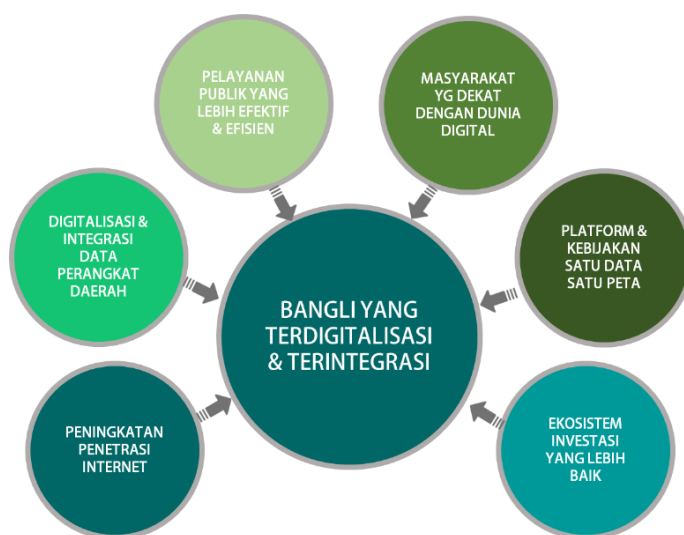
Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Tersedianya kebijakan pemerintah Kabupaten Bangli sebagai payung hukum bagi perencanaan, implementasi, dan evaluasi konsep satu data dan satu peta di Kabupaten Bangli. Sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan satu data dan satu peta ini memiliki dasar hukum agar segala bentuk tindakan strategis memiliki keabsahan dan amanat. Bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak terkonsep, mendadak, dan acak.
- b. Tersedianya rumah besar (media) dalam bentuk sistem informasi yang kompleks yang dapat menjadi wadah dari seluruh tugas dan fungsi perangkat daerah di Kabupaten Bangli. Rumah besar ini kemudian akan diturunkan ke dalam bentuk sistem informasi yang lebih sederhana sesuai dengan fokus bidang yang akan ditangani hingga tahun 2026. Misalnya untuk bidang investasi dan perijinan memiliki sistem informasi tersendiri, begitu pula dengan bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, pariwisata, dll.

6. Ekosistem Investasi Yang Lebih Baik

Selama ini investor khususnya investor lokal mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel mengenai potensi investasi di Kabupaten Bangli. Bagi investor yang lebih besar (skala nasional dan global) akan memanfaatkan teknologi informasi seperti Google, social media, dll dalam menggali informasi mengenai Kabupaten Bangli. Namun sayangnya tidak banyak informasi mengenai investasi yang dibuka dan beredar di dunia maya sehingga para investor yang memiliki ketertarikan akan kesulitan untuk menyusun perencanaan yang matang dalam berinvestasi di Kabupaten Bangli.

Dengan semakin baiknya tingkat integrasi dan tingkat digitalisasi data perangkat daerah tentu saja akan meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang beredar di masyarakat. Masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang akurat mengenai kondisi actual Kabupaten Bangli khususnya potensi investasi, perijinan dan pemanfaatan ruang. Kemudahan-kemudahan ini tentu saja akan memberikan kenyamanan bagi investor untuk dapat masuk ke Kabupaten Bangli. Setidaknya investor sudah dapat menyusun perencanaan yang lebih akurat dengan memanfaatkan data potensi-potensi yang sudah dibuka secara publik melalui sistem informasi pemerintahan Kabupaten Bangli.



Gambar 2.1.

Kondisi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2026

Sedangkan secara khusus pada masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Bangli, kondisi inovasi daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.

Kondisi Inovasi Daerah Yang Ingin Dicapai Pada Masing-Masing Perangkat Daerah di Kabupaten Bangli Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	KONDISI INOVASI DAERAH TAHUN 2026
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	• Optimalisasi aplikasi yang sudah ada khususnya Aplikasi DAPODIK • Terintegrasinya data Disdikpora & Dukcapil
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	• Pengembangan sistem informasi Cipta Karya • Pengembangan WebGIS Penataan Ruang Bangli • Tersedianya sistem informasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman: database rumah & kaw kumuh • Terintegrasinya data dgn data perijinan • Terintegrasinya data masyarakat kawasan kumuh dengan data; Dinas Sosial; serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	• Optimalisasi sistem informasi pangan Kabupaten Bangli • Optimalisasi database petani dan lahan pertanian (termasuk data subak) • Terintegrasinya data petani dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil • Terintegrasinya data subak, daerah irigasi, dengan data rencana pola ruang dalam RTRW Kabupaten
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Optimalisasi aplikasi SIKS-NG & SIVERI • Integrasi aplikasi & Data Dinsos dengan • data Kependudukan dan Catatan Sipil • Bangli memperoleh status Kabupaten Layak Anak • Tersedianya layanan perlindungan kekerasan wanita & Anak
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	• Optimalisasi database kepariwisataan • Optimalisasi sosial media

NO	PERANGKAT DAERAH	KONDISI INOVASI DAERAH TAHUN 2026
		dalam promosi kepariwisataan • Kemudahan perijinan industri kreatif • Terintegrasinya data akomodasi pariwisata dengan data perijinan dan data fasilitas kesehatan
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;	• Tersedianya sistem informasi Koperasi& UKM • Terintegrasinya data UMKM dengan data Dukcapil & Perijinan • Terintegrasinya data ketenagakerjaan dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil, dan BPJS Ketenagakerjaan. • Tersedianya media untuk penyebarluasan informasi mengenai lowongan pekerjaan, bursa karir, pelatihan-pelatihan, <i>workshop</i>, dan seminar ketenagakerjaan.
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;	• Tersedianya Tersedianya sistem informasi pelayanan penegakan PERDA • Tersedianya sistem informasi mengenai kebencanaan di Kabupaten Bangli • Terintegrasinya data infrastruktur dasar dengan data kebencanaan Kabupaten Bangli
8	Dinas Kesehatan	• Optimalisasi aplikasi Sisrute, PSC Online, SIKK, Aplikasi Keluarga, &Aspak • Kemudahan pelayanan kesehatan termasuk pengurusan administrasi, penggunaan BPJS, hingga pembayaran. • Terintegrasinya data BPJS Kesehatan dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil • Terintegrasinya data fasilitas

NO	PERANGKAT DAERAH	KONDISI INOVASI DAERAH TAHUN 2026
		kesehatan dengan akomodasi wisata yang dapat digunakan sebagai fasilitas kesehatan sementara dalam menghadapi pandemi
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;	• Meningkatnya cakupan layanan jaringan telekomunikasi • Meningkatnya penetrasi internet rumah tangga khususnya pada kawasan perdesaan dengan geografis sulit dijangkau • Masyarakat fasih dalam memanfaatkan aplikasi dan sistem informasi • Terintegrasinya data jaringan komunikasi dengan data perijinan dan penataan ruang • Pegawai Golongan IV dan Golongan III telah memiliki tanda tangan elektronik • Seluruh perangkat daerah dibuatkan kode unik sebagai single identity yang dapat dipindai dan digunakan sebagai pengganti kelengkapan surat-menyurat • Merupakan Head Quarter untuk Big • Data Kabupaten Bangli
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	• Sistem informasi industri & perdagangan • Kolaborasi Koperasi, UMKM, dan industri kecil menengah • Terintegrasinya data industri dan perdagangan dengan data perijinan, dengan data tata ruang, dan data kependudukan dan catatan sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PPKB	• Masyarakat desa aktif dalam menjalankan program desa dan perangkat daerah • Tersedianya pusat-pusat internet di desa- • desa yang sulit dijangkau
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Data Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi data

NO	PERANGKAT DAERAH	KONDISI INOVASI DAERAH TAHUN 2026
		dasar bagi seluruh perangkat daerah • Optimalisasi SIPANDU menjadi Extended ID bagi penduduk Kabupaten Bangli • Penduduk Kabupaten Bangli memiliki <i>e-identity</i> berupa kode unik yang dapat dipindai untuk kepentingan pengurusan administrasi, perijinan, berusaha dll sehingga tidak lagi menggunakan e-ktp fisik maupun rekaman • Terintegrasinya data dukcapil dengan • seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bangli
13	Dinas Lingkungan Hidup	• Tersedianya RPPLH Kab Bangli • Tersedianya database Lingkungan Hidup Kab Bangli • Terintegrasinya data lingkungan hidup • dengan perijinan, dan penataan ruang.
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Tersedianya data potensi investasi • Tersedianya sistem informasi perijinan sehingga proses perijinan dapat dilakukan secara daring dan transparan dimana pemohon ijin dapat memantau perkembangan (progresifitas) ijin yang diajukan hingga ijin dikeluarkan. • Perijinan dikeluarkan dalam bentuk file yang berisikan kode unik secara daring • Terintegrasinya data perijinan dengan data kependudukan dan catatan sipil, data penataan ruang, data asset dan pendapatan daerah • Peningkatan jumlah investasi yang • berasal dari investasi online • Birokrasi perijinan yang lebih

NO	PERANGKAT DAERAH	KONDISI INOVASI DAERAH TAHUN 2026
		- ringkas - dan lebih mudah
15	Dinas Perhubungan	- Tersedianya Command Centre untuk mengawasi tangkapan kamera pengawas - Terpasangnya kamera pengawas pada titik-titik strategis di Kabupaten Bangli sebagai media dalam melakukan pengawasan maupun mengumpulkan data masyarakat - Migrasi tilang fisik menjadi tilang - online
16	Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	- Tersedianya peta potensi pendapatan daerah yang sudah terintegrasi dengan data perijinan dan penataan ruang - Data asset yang sudah terdigitalisasi dan terpetakan dan terintegrasi dengan data perijinan dan penataan ruang - Tersedianya sistem informasi keuangan daerah yang dapat menjadi portal informasi mengenai pendapatan daerah, APBD, fiskal, dll.
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Tersedianya sistem informasi kelitbangan - Tersedianya informasi mengenai kajian- kajian dan kebijakan daerah yang - terintegrasi dengan perpustakaan online

Sumber: Hasil Kajian, 2021

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021-2026

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI

Tujuan penguatan SIDA Kabupaten Bangli merupakan hasil akhir yang akan dicapai pada akhir masa implementasi kebijakan (tahun 2026). Perumusan tujuan penguatan SIDA sendiri tidak disyaratkan dalam substansi SIDA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan

Teknologi, serta Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012, dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Namun mengingat tujuan mewakili kondisi akhir yang akan dicapai dan berkorelasi dengan sub bab sebelumnya, yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan SIDA maka perumusan tujuan tentu memegang peranan penting.

Tujuan penguatan SIDA Kabupaten Bangli mengacu pada 2 aspek utama yaitu; (1) visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026, dan (2) Kondisi SIDA Kabupaten Bangli Yang Akan Dicapai Tahun 2026. Adapun tujuan penguatan SIDA Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

“TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DAERAH UNTUK MENUJU BANGLI ERA BARU”

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli tahun 2021-2026 adalah *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Di Kabupaten Bangli” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Wujudkan Bangli Era Baru* dimana yang menjadi sorotan utama dalam penyusunan tujuan penguatan SIDA adalah frasa **Bangli Era Baru**. Bangli Era Baru dapat diartikan sebagai Kabupaten Bangli yang mengalami perubahan atau transformasi menuju kondisi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Sehingga transformasi adalah kata yang tepat untuk mewakili Bangli Era Baru.

Seperti yang sudah diulas dalam Bab 6, bahwa upaya mendorong terciptanya inovasi akan difokuskan pada sektor pelayanan publik. Mengingat bahwa secara kualitas, penduduk Kabupaten Bangli sangat sulit memiliki keinginan, mendayagunakan kemampuan, dan melaksanakan kegiatan inovatif. Sehingga inovasi akan difokuskan pada pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Bangli.

Diharapkan dengan adanya transformasi pelayanan publik menuju era digital maka akan dapat dicapai kondisi Bangli Era Baru dimana inovasi-inovasi yang berhasil diciptakan merupakan inovasi dari pemerintah untuk meningkatkan derajat dan taraf hidup masyarakat. Transformasi digital ini juga memberikan landasan bagi masyarakat Kabupaten Bangli untuk dapat lebih dekat dan terbiasa dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-harinya.

Untuk dapat mewujudkan tujuan penguatan SIDA Kabupaten Bangli tersebut, maka dibutuhkan tahapan-tahapan strategis yang menjadi sasarannya. Adapun sasaran-sasaran untuk mewujudkan transformasi digital pelayanan publik daerah menuju Bangli Era Baru adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Pelayanan Jaringan Telekomunikasi**
- 2. Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, Dan Integrasi Data Digital**
- 3. Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik Strategis**
- 4. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pelayanan Publik Strategis Berbasis Digital**

Sasaran tersebut di atas dapat diibaratkan sebagai 4 tahapan yang harus dilaksanakan secara seksama dan berurutan guna mewujudkan transformasi digital pelayanan publik daerah. Pada tahap pertama tentu saja kita harus membangun pondasi yang kokoh sebelum membangun perubahan. Apabila transformasi digital diibaratkan sebagai sebuah rumah, maka pondasinya adalah ketersediaan pelayanan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang

mumpuni. Mumpuni secara kuantitas yaitu pemerataan persebaran jaringan dan kualitas yaitu kemampuan menyebarluaskan informasi melalui jaringan tersebut. Ketika pondasi sudah dibangun dengan baik maka selanjutnya kuantitas, kualitas, dan integrasi data digital menjadi sebuah keniscayaan untuk bisa terwujud. Semakin mudahnya kemampuan mengakses informasi dan mengolah data maka akan semakin mudah dalam mengambil keputusan yang sulit secara akurat.

Data-data yang sudah bermigrasi dalam bentuk digital dan kemudian telah ditransformasikan dan diintegrasikan ke dalam wadah yang lebih kompleks seperti sistem informasi dapat digunakan sebagai media pelayanan publik. Apalagi data-data tersebut telah terintegrasi maka proses pelayanan publik akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan meningkatnya tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik maka akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkannya. Keseluruhan rangkaian sasaran penguatan SIDA ini dapat diibaratkan sebagai rangkaian sebab akibat yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Apabila satu sasaran tidak dapat tercapai atau tidak dapat terlaksana secara optimal maka dapat dipastikan sasaran lainnya tidak akan berjalan dengan baik pula. Oleh karenanya sangat penting untuk memastikan keseluruhan sasaran dapat dicapai dan dilaksanakan dengan optimal.

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan bentuk implementatif dari sasaran penguatan SIDA yang sudah diulas sebelumnya. Masing-masing sasaran memiliki strategi khusus yang lebih terperinci dan lebih terukur. Adapun strategis penguatan SIDA Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Bangli

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi	1. Memperluas cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi dan informasi (kabel maupun nirkabel) 2. Meningkatkan perkembangan usaha jasa telekomunikasi dan informasi
2	Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan integrasi data digital	1. Mempercepat migrasi dan konversi data manual menuju data digital untuk seluruh perangkat daerah 2. Mendorong pemanfaatan data tunggal bagi seluruh perangkat daerah 3. Menciptakan ekosistem

NO	SASARAN	STRATEGI
		pemerintahan daerah berbasis sistem informasi digital 4. Menciptakan iklim yang kondusif terhadap investasi berbasis digital
3	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan publik strategis	Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan publik strategis berbasis digital	Mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara nyata oleh masyarakat dalam pelayanan publik strategis

Sumber: Hasil Kajian, 2021

Sedangkan arah kebijakan penguatan SIDA merupakan visualisasi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran penguatan SIDA yang sudah tercantum dalam Tabel 7.1. Adapun arah kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Memperluas cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi dan informasi (kabel maupun nirkabel)	• Semakin banyak dan tersebar merata jaringan telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Bangli yang dapat dinikmati masyarakat • Peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi pada seluruh perangkat daerah
2	Meningkatkan perkembangan usaha jasa telekomunikasi dan informasi	Kabupaten Bangli mendukung peningkatan iklim investasi industri kreatif dan pariwisata dengan meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan kuantitas penyedia layanan internet berbasis sinyal maupun jaringan serat optic
3	Mempercepat migrasi dan konversi data manual menuju data digital untuk seluruh perangkat daerah	Keterbukaan informasi publik pada seluruh perangkat daerah dimana data-data publik dapat diakses secara terbuka sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas
4	Mendorong pemanfaatan data tunggal bagi seluruh perangkat daerah	Terintegrasinya data antar perangkat daerah sehingga tercipta konektivitas data antar perangkat daerah yang baik khususnya untuk data dukcapil, kesehatan, pendidikan, perijinan,

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pariwisata, dan pertanian
5	Menciptakan ekosistem pemerintahan daerah berbasis sistem informasi digital	• Peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah melalui integrasi dan konektivitas data antar perangkat daerah • Aktivitas pelayanan publik sebagian besar dilakukan secara daring (online)
6	Menciptakan iklim yang kondusif terhadap investasi berbasis digital	Kabupaten Bangli mendukung peningkatan iklim investasi industri kreatif dan pariwisata dengan memberikan kemudahan bagi investasi yang berbasis digital serta potensi lokal
7	Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital	• Aktivitas pelayanan publik sebagian besar dilakukan secara daring (online) • Optimalisasi seluruh aplikasi pelayanan publik yang ada saat ini melalui update sistem serta update kualifikasi tenaga IT pada masing-masing perangkat daerah
8	Mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara nyata oleh masyarakat dalam pelayanan publik strategis	Pengintegrasian data kependudukan, data perijinan, dan data pelayanan infrastruktur dasar sehingga masyarakat terbiasa untuk memanfaatkan TI dalam memenuhi kebutuhan dasar.

BAB IV

FOKUS, PRIORITAS DAN PROGRAM

4.1. FOKUS PENGUATAN SIDA KABUPATEN BANGLI

Fokus penguatan SIDA merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan apa yang menjadi keunggulan kompetitif dan komparatif Kabupaten Bangli. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi daerah dan kondisi sistem inovasi daerah Kabupaten Bangli tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan secara radikal dalam 5 tahun ke depan. Dibutuhkan perumusan kebijakan yang terfokus dan bertahap untuk dapat menghasilkan output yang optimal. Terlebih jangka waktu 5 tahun bukan merupakan masa yang cukup panjang untuk melakukan inovasi pada seluruh urusan pemerintahan di Kabupaten Bangli. Fokus-fokus penguatan SIDA akan dilakukan pada sektor-sektor unggulan dan strategis bagi Kabupaten Bangli. Dengan fokus pada sektor tertentu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi lebih baik sekaligus menciptakan daya ungkit bagi sektor lainnya untuk dapat melakukan inovasi yang serupa.

Fokus penguatan SIDA Kabupaten Bangli akan dilaksanakan menurut 2 kepentingan. Kepentingan pertama adalah kepentingan indeks inovasi nasional yang menjadi tolok ukur kinerja inovatif pemerintahan daerah. Kepentingan kedua adalah penguatan SIDA pada sektor-sektor strategis Kabupaten Bangli untuk dapat memberikan efek dorong signifikan bagi ekonomi dan kesejahteraan penduduknya.

4.1.1. Fokus Penguatan SIDA Pada Indikator Inovasi Nasional

Kementerian Dalam Negeri melalui direktorat penelitian dan pengembangannya telah merumuskan indeks inovasi berdasarkan satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah. Satuan Pemerintah Daerah (SPD) diukur berdasarkan 16 indikator sedangkan Satuan Inovasi Daerah diukur berdasarkan 20 indikator. Fokus penguatan SIDA akan dilakukan pada Satuan Inovasi Daerah (SID) karena apabila SID sudah berjalan optimal maka penguatan SPD akan menjadi sebuah konsekuensi logis layaknya hubungan sebab akibat. Adapun indikator-indikator dalam mengukur tingkat SID daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1.

Penjelasan Indikator Inovasi Pada Satuan Inovasi Daerah

NO	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL
1	Regulasi Inovasi	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)
3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi
		(penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasa, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)
4	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan
5	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah
6	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah Dituangkan dalam program pembangunan daerah
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)
8	Pelaksana Inovasi Daerah	Penetapan Tim pelaksana inovasi daerah
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)

NO	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)
11	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book
12	Kemudahan Informasi Layanan	Kemudahan Mendapatkan Informasi Layanan
13	Kemudahan proses inovasi Yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 tahun terakhir
15	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)
17	Kecepatan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.
18	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir)
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)

Sumber: Pedoman Umum Penilaian & Pemberian Innovative Government Award 2021

Indikator-indikator tersebut di atas digunakan sebagai instrument untuk mengukur tingkat inovasi daerah. Semakin baik indeks dari masing-masing indikator maka semakin baik pula tingkat inovasi daerah bersangkutan. Dalam fokus penguatan SIDA Kabupaten Bangli, tidak semua indikator dalam SID akan digunakan sebagai indikator fokus. Indikator SID akan disaring kembali menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penguatan SIDA Kabupaten Bangli. Adapun indikator-indikator SID yang akan digunakan sebagai indikator fokus penguatan SIDA adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.

Indikator Penguatan SIDA Kabupaten Bangli

NO	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	Regulasi Inovasi	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan	Regulasi di Kabupaten Bangli yang telah menetapkan nama-nama inovasi yang sudah dihasilkan dan digunakan dalam pelayanan publik

NO	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL	KETERANGAN
		operasional penerapan Inovasi Daerah	Pemerintah Kabupaten Bangli
2	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekrutan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimbingan teknis, urusan jenis layanan)	Persentase anggaran dalam APBD Kabupaten Bangli untuk pelaksanaan urusan kelurahan dan sektor-sektor strategis seperti perijinan & investasi, Dukcapil, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, serta Pariwisata & ekonomi kreatif.
3	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	Inovasi pelayanan publik yang dilakukan di Kabupaten Bangli berbasis penggunaan IT
4	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	Ketersediaan SDM yang fasih menggunakan IT di pemerintahan Kabupaten Bangli masih rendah sehingga dibutuhkan banyak kegiatan pelatihan dan BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai pelaksana inovasi pelayanan publik daerah
5	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah Dituangkan dalam program pembangunan daerah	Inovasi pelayanan publik harus masuk ke dalam RKPD agar dapat diaplikasikan secara luas dan legal oleh perangkat daerah serta memudahkan dalam penyusunan penganggaran tahunan.
6	Pelaksana Inovasi Daerah	Penetapan Tim pelaksana inovasi daerah	Pelaksana inovasi adalah seluruh perangkat daerah, tidak terbatas pada tim

NO	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL	KETERANGAN
			tertentu saja. Hal ini mengingat inovasi yang akan dilakukan adalah inovasi pelayanan publik yang mencakup hampir seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bangli.
7	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Salah satu sasaran penguatan SIDA Kabupaten Bangli adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasis sistem informasi. Sehingga dibutuhkan sosialisasi yang proporsional dalam segala media agar sistem informasi pelayanan publik lebih dikenal masyarakat dan semakin tinggi traffic pemanfaatannya
8	Kemudahan Informasi Layanan	Kemudahan Mendapatkan Informasi Layanan	Semakin mudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai inovasi pelayanan publik maka akan semakin baik respon pemanfaatan oleh masyarakat.
9	Kemudahan proses inovasi Yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	Semakin cepat masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya melalui sistem informasi pelayanan publik, maka semakin tinggi tingkat kebergantungan masyarakat dalam pemanfaatan sistem informasi tersebut.
10	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 tahun terakhir	Kabupaten Bangli sudah memiliki kebijakan mengenai reaksi cepat 24 jam yang dapat diintegrasikan dengan layanan pengaduan pelayanan publik berbasis sistem informasi.
11	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)	Seluruh pelayanan publik strategis dapat dilakukan dan diselesaikan secara online. Masyarakat tidak

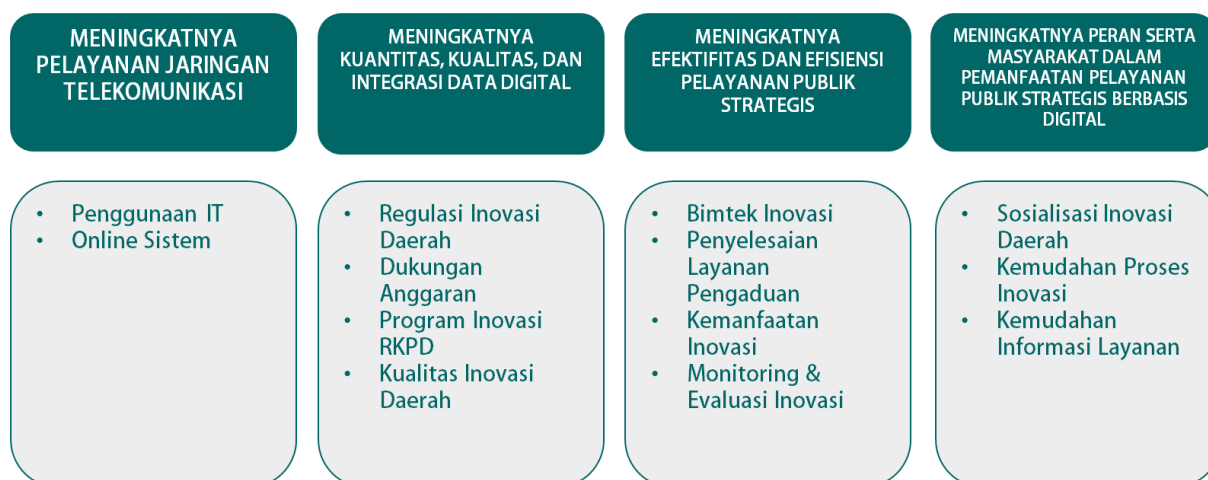
NO	INDIKATOR INOVASI	DEFINISI OPERASIONAL	KETERANGAN
			perlu lagi untuk datang secara fisik, melakukan antrian, pencetakan bukti pembayaran/kepemilikan, hingga transaksi.
12	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir)	Peningkatan jumlah unduhan aplikasi dan traffic pemanfaatan sistem informasi
13	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Mengingat inovasi yang dilakukan merupakan pelayanan publik berbasis inovasi maka monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan secara real time untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi sistem. Hasil monev akan menjadi dasar dalam upaya pengembangan, perbaikan, atau penghentian layanan
14	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Kualitas inovasi akan menyasar pada jumlah pelayanan publik yang dapat dilaksanakan secara online dan berjalan dengan baik (dimanfaatkan sebagian besar masyarakat)

Sumber: Hasil Kajian, 2021

Indikator-indikator fokus penguatan tersebut harus terkoneksi dan terintegrasi dengan sasaran penguatan SIDA Kabupaten Bangli. Tujuannya adalah agar masing-masing sasaran memiliki fokus pelaksanaan sehingga lebih mudah dalam melakukan evaluasi implementasinya. Adapun keterkaitan antara indikator dan sasaran Penguatan SIDA Kabupaten Bangli Tahun 2026 dapat dilihat pada **gambar 4.1** berikut.

Gambar 4.1.

Keterkaitan Indikator Fokus Penguatan SIDA dengan Sasaran Penguatan SIDA Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026



4.1.2. Fokus Penguatan SIDA Pada Sektor-Sektor Strategis Kabupaten Bangli
Penguatan SIDA dalam 5 tahun ke depan tidak dapat dilakukan secara komprehensif terkait dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD Semester Berencana Tahun 2021-2026 dan masih rendahnya kemampuan penganggaran, dan SDM IT ASN Kabupaten Bangli. Oleh karenanya akan dilakukan fokus penguatan SIDA pada sektor-sektor strategis Kabupaten Bangli. Adapun sektor-sektor strategis tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.

Nilai Strategis dan Tingkat Prioritas Sektor Dalam Penguatan SIDA Kabupaten Bangli

NO	SEKTOR PRIORITAS	NILAI STRATEGIS	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
1	Perijinan dan Investasi	Kabupaten Bangli masih dianggap sebagai wilayah konservasi sehingga belum banyak investasi yang masuk. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya realisasi investasi dalam negeri dan asing di Kabupaten Bangli pada 5 tahun terakhir. Akibatnya banyak potensi investasi di Kabupaten Bangli tidak dilirik oleh investor. Pemerintah Kabupaten	1	- Dinas Penanaman Modal dan PTSP - Dinas PU, Penataan Ruang,
				Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SEKTOR PRIORITAS	NILAI STRATEGIS	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
		Bangli akan membuka seluas-luasnya pintu investasi yang mungkin dapat dilakukan di Bangli. Semakin tinggi tingkat investasi maka semakin meningkat pula potensi pendapatan daerah		
2	Kesehatan	Seluruh dunia (termasuk Kabupaten Bangli) masih berjuang untuk bebas dari Pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbaiki sistem kesehatan yang ada agar dapat lebih preventif dan mitigatif terhadap penanggulangan Pandemi. Sistem kesehatan di Kabupaten Bangli perlu untuk segera diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan lancar di tengah Pandemi.	1	Dinas Kesehatan
3	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skema Bangli Satu Data dan Satu Peta dapat terwujud apabila terjadi integrasi dan digitalisasi data yang optimal. Salah satu data krusial yang menjadi base data perangkat daerah lainnya adalah data kependudukan dan pencatatan sipil. Apabila data kependudukan dan pencatatan sipil sudah terdigitalisasi seleuruhnya dan terintegrasi dengan data-data perangkat daerah lainnya maka	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

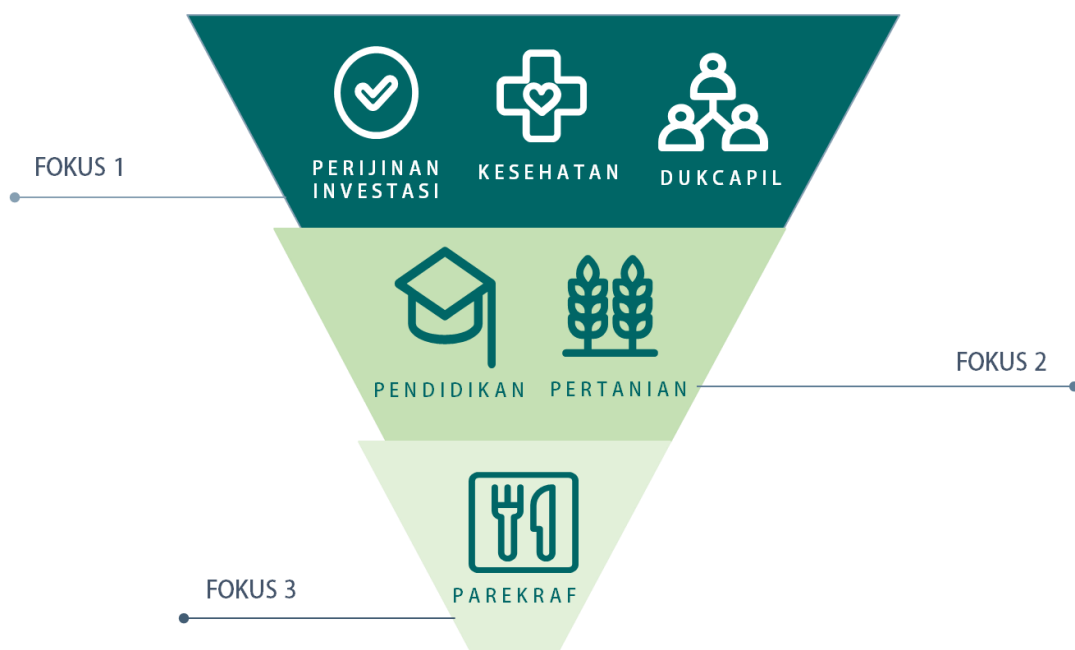
NO	SEKTOR PRIORITAS	NILAI STRATEGIS	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
		skema Bangli Satu Data dan Satu Peta akan dengan mudah dapat terwujud.		
4	Pendidikan	Inovasi di Kabupaten Bangli terkendala dari rendahnya kualitas SDM penduduknya yang tercermin dari rendahnya IPM Kabupaten Bangli. Salah satu faktor Penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang rendah.	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	Pertanian	Pertanian merupakan sektor paling tinggi dalam memberikan kontribusi dalam PDRB Kabupaten Bangli. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan namun kontribusinya tetap yang tertinggi di tahun 2020. Oleh karenanya dibutuhkan inovasi-inovasi khusus agar sektor pertanian dapat mengalami pertumbuhan yang positif dan berdampak secara mikro dan makro dalam perbaikan ekonomi Kabupaten Bangli	2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
6	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata adalah sektor andalan Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli memiliki daya tarik wisata yang sudah diakui dunia dan nasional yaitu Geopark Batur dan KSPN Kintamani. Melihat pada nilai strategis tersebut maka inovasi pelayanan publik terkait pariwisata adalah hal yang mutlak	3	• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, • Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi • Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	SEKTOR PRIORITAS	NILAI STRATEGIS	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
		untuk dijalankan. Ekonomi Kreatif tidak akan terlepas dari pariwisata. Kedua sektor ini saling terkait dan saling membutuhkan. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, sektor ekonomi kreatif turut menuai manfaatnya. Semakin mudah untuk pemasaran dan transaksi menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian beralih ke sektor ekonomi kreatif. Namun sayangnya sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bangli belum sepenuhnya terintegrasi dengan sektor pariwisata.		

Sumber: Hasil Kajian, 2021

Gambar 4.2.

Fokus Sektor Penguatan SIDA Kabupaten Bangli



2.3. PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SIDA KABUPATEN BANGLI

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program prioritas dalam penguatan SIDA Kabupaten Bangli merupakan pengejawantahan secara operasional dari Tujuan, Sasaran, dan Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Bangli. Program prioritas juga merupakan program-program strategis dan unggulan pada sektor-sektor yang menjadi fokus penguatan SIDA Kabupaten Bangli.

Program prioritas akan disusun berdasarkan masing-masing strategi dan akan dijabarkan atau dipetakan selama 5 tahun implementasi kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Bangli. Adapun program-program prioritas penguatan SIDA Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4.

Program-Program Prioritas Penguatan SIDA Kabupaten Bangli

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi	Memperluas cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi dan informasi (kabel maupun nirkabel)	1. Peningkatan Penyebaran jaringan serat optic desa 2. Pengembangan pusat internet desa 3. Peningkatan pelayanan Menara Telekomunikasi 4. Pengembangan Rencana Induk Telekomunikasi Kabupaten Bangli
	Meningkatkan perkembangan usahajasa telekomunikasi dan informasi	1. Insentif perijinan usaha jasa telekomunikasi
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan integrasi data digital	Mempercepat migrasi dan konversi data manual menuju data digital untuk seluruh perangkat daerah	1. Digitalisasi aset daerah dan potensi pendapatan daerah 2. Digitalisasi data hasil panen pertanian 3. Digitalisasi data lahan baku sawah dan Data Lahan Sawah Subak 4. Digitalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana turunannya 5. Digitalisasi data sekolah, guru, dan siswa 6. Digitalisasi data akomodasi wisata dan Data Daya Tarik Wisata 7. Digitalisasi data UMKM dan

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS
		Koperasi 8. Pengembangan Database Perijinan dan Potensi Investasi berbasis GIS 9. Pengembangan Database Pemanfaatan Ruang dan Jaringan Prasarana Wilayah 10. Pengembangan Database Pertanian berbasis GIS 11. Pengembangan Database Pariwisata berbasis GIS 12. Pengembangan Database Kependudukan berbasis GIS 13. Pengembangan Database Pendidikan berbasis GIS 14. Pengembangan Database UMKM dan Koperasi berbasis GIS 15. Pengembangan Database Perindustrian berbasis GIS 16. Pengembangan database Kebencanaan berbasis GIS
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan integrasi data digital	Mendorong pemanfaatan data tunggal bagi seluruh perangkat daerah	1. Kebijakan Satu Data Kabupaten Bangli 2. integrasi data akomodasi pariwisata dan data fasilitas kesehatan 3. integrasi data kependudukan dengan data pendidikan 4. integrasi data investasi dan perijinan dengan rencana tata ruang dan data dukcapil 5. integrasi data pertanian dengan data BPN dan rencana tata ruang 6. integrasi data pertanian dengan data kependudukan
	Menciptakan ekosistem Pemerintahan daerah berbasis sistem informasi digital	1. Pengembangan dan Integrasi aplikasi system informasi Manajemen Kepegawaian 2. Pengembangan TTD elektronik & QR Code Perangkat Daerah 3. Paperless Policy 4. Cloud-Based Work 5. Screen-Time Based Work

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS
	Menciptakan iklim yang kondusif terhadap investasi berbasis digital	1. Pengembangan Sistem Informasi 'Warung Digital' 2. Seleksi produk UMKM untuk Warung Digital 3. Pemasaran Produk Warung Digital Berbasis Media Sosial 4. Pemasaran Produk Warung Digital Berbasis Perijinan 5. Program Teman Kopi
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan publik strategis	Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital	1. Pengembangan Mall Pelayanan Publik 2. Pengembangan Aplikasi SIPANDU sebagai Extended ID 3. Pengembangan layanan informasi perijinan, penataan ruang, & investasi online 4. Pengembangan insentif perijinan dan investasi online 5. Pengembangan Aplikasi Layanan Kesehatan Terpadu 6. Pengembangan Aplikasi Layanan Pendidikan Terpadu 7. Peningkatan kualitas SDM IT Perangkat daerah 8. Peningkatan kualitas SDM IT perangkat desa dan kelurahan 9. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik tingkat desa 10. Pengembangan sistem informasi subak 11. Pengembangan sistem informasi desa wisata digital
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan publik strategis berbasis digital	Mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara nyata oleh masyarakat dalam Pelayanan publik strategis	1. Sosialisasi sistem informasi perangkat daerah 2. Alih Pengetahuan dan Teknologi Petani Jejaring Provinsi 3. Alih Pengetahuan dan Teknologi Perijinan dan Investasi Jejaring Provinsi dan Nasional 4. Integrasi pelayanan dasar dalam sistem informasi perangkat daerah

Tabel 4.5.

Indikasi Program Prioritas Penguatan SIDA Kabupaten Bangli Tahun 2022-2026

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	STRATEGI 1 : Memperluas cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi dan informasi (kabel maupun nirkabel)								
1	Peningkatan Penyebaran jaringan serat optic desa	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga terlayani internet							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
2	Pengembangan pusat internet desa	Persentase jumlah desayang memiliki pusat internet di Kantor Desa							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
3	Peningkatan pelayanan Menara Telekomunikasi	Peningkatan jumlah persebaran BTS pada wilayah yang belum terlayani							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
4	Pengembangan Rencana Induk Telekomunkasi Kabupaten Bangli	Jumlah peraturan mengenai Rencana Induk Telekomunikasi Kabupaten Bangli							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
B	STRATEGI 2 : Meningkatkan perkembangan usaha jasa telekomunikasi dan informasi								
1	Insentif perijinan usaha jasa telekomunikasi	Jumlah peraturan insentif jasa usaha telekomunikasi							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
C	STRATEGI 3 : Mempercepat migrasi dan konversi data manual menuju data digital untuk seluruh perangkat daerah								
1	Digitalisasi aset daerah dan potensipendapatan daerah	Peningkatan jumlah asset dan potensi pendapatan daerah yang telah terdigitalisasi							BPKAD

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Digitalisasi data hasil panen pertanian	Persentase data yang sudah berbentuk digital dan dapat diunduh pada sistem informasi pertanian							Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
3	Digitalisasi data lahan baku sawah dan Data Lahan Sawah Subak	Persentase luas lahan baku sawah eksisting dan lahan sawah subak eksisting yang sudah terpetakan berdasarkan standar BIG							Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
4	Digitalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana turunannya	Ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang dapat diunduh oleh masyarakat							Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Digitalisasi data sekolah, guru, dan siswa	Persentase data sekolah, guru, dan siswa yang terintegrasi dalam sistem informasi pendidikan							Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
6	Digitalisasi data akomodasi wisata dan Data Daya Tarik Wisata	Persentase akomodasi wisata dan DTW yang sudah berbentuk digital dan terintegrasi dengan sistem informasi pariwisata							Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7	Digitalisasi data UMKM dan Koperasi	Persentase data UMKM dan Koperasi yang sudah terdigitalisasi dan dapat diunduh pada sistem informasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Nakertrans							Dinas Koperasi, UMKM, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Pengembangan Database Perijinan dan Potensi Investasi berbasis GIS	Tersedianya basis data dan pemetaan perijinan dan potensi investasi berbasis spasial (GIS) yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP							Dinas Penanaman Modal dan PTSP
9	Pengembangan Database Pemanfaatan Ruang dan Jaringan Prasarana Wilayah	Tersedianya database pemanfaatan ruang eksisting dan database jalan dengan basis GIS yang selalu terupdate							Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pengembangan Database Pertanian berbasis GIS	Tersedianya database pertanian yang mencakup data produksi, luas lahan, subak, kelompok tani, DI, LP2B dan KP2B, harga-harga, bantuan & program.							Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
11	Pengembangan Database Pariwisata berbasis GIS	Tersedianya database pariwisata yang mencakup data akomodasi, fasilitas penunjang, kunjungan wisatawan, DTW.							Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Pengembangan Database Kependudukan berbasis GIS	Diperbaharuinya data kependudukan dalam sistem informasi Disdukcapil untuk dapat diintegrasikan dengan data perangkat daerah							Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		lainnya							
13	Pengembangan Database Pendidikan berbasis GIS	Tersedianya dan termutakhirkannya secara berkala database pendidikan yang mencakup: jumlah dan titik lokasi sekolah, jumlah dan ID murid, Jumlah dan ID Guru, jumlah dan ID Pegawai, Mutasi pegawai, Mutasi Guru, Siswa Pindah Sekolah							Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
14	Pengembangan Database UMKM dan Koperasi berbasis GIS	Tersedianya basis data UMKM dan Koperasi mencakup: Jumlah, jenis, sebaran, Kontak, Pendapatan, Sosial Media UMKM dan Koperasi yang dapat dimutakhirkan secara berkala dan diakses secara real time							Dinas Koperasi, UMKM, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi
15	Pengembangan Database Perindustrian berbasis GIS	Tersedianya database perindustrian							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16	Pengembangan database Kebencanaan berbasis GIS	Tersedianya database kebencanaan berbasis GIS							BPBD
D	STRATEGI 4 : Mendorong Pemanfaatan Data Tunggal Bagi Seluruh Perangkat Daerah								
1	Kebijakan Satu Data Kabupaten Bangli	Tersedianya peraturan tentang Bangli Satu Data Satu Peta							Bappedalitbang

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Integrasi data akomodasi pariwisata dan data fasilitas kesehatan	Persentase data akomodasi wisata dan fasilitas kesehatan yang telah terintegrasi							Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
3	Integrasi data kependudukan dengan data pendidikan	Persentase ID Penduduk dan ID Siswa, Guru, dan Pegawai yang telah terintegrasi							Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
4	Integrasi data investasi dan perijinan dengan rencana tata ruang dan data dukcapil	Persentase data perijinan yang terintegrasi dengan RTRW dan ID Penduduk							Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Integrasi data pertanian dengan data BPN dan rencana tata ruang	Persentase data luas sawah yang sudah terintegrasi dengan lahan sawah menurut ID pemilik							BPN dan Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Integrasi data pertanian dengan data kependudukan	Persentase data ID Petani yang sudah terintegrasi dengan ID Penduduk							Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
E	STRATEGI 5 : Menciptakan Ekosistem Pemerintahan Daerah Berbasis Sistem Informasi Digital								
1	Pengembangan dan Integrasi aplikasi sistem informasi Manajemen Kepegawaian	Tersedianya aplikasi kepegawaian sebagai ID ASN Kab Bangli							Badan Kepegawaian dan SDM

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Pengembangan TTD Elektronik & QR Code Perangkat Daerah	Tersedianya TTD Elektronik untuk ASN Golongan IV dan III pada perangkat daerah							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
		Tersedianya QR Code pada masing-masing perangkat daerah							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
3	Paperless Policy	Tersedianya peraturan tentang pemanfaatan file doc di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangli							Bappedalitbang
4	Cloud-Based Work	Tersedianya sistem penyimpanan file berbasis cloud pada seluruh perangkat daerah							Seluruh Perangkat Daerah
5	Screen-Time Based Work	Peningkatan jumlah rapat, pertemuan, dan kunjungan antar instansi dengan media daring							Seluruh Perangkat Daerah
F	STRATEGI 6 : Menciptakan iklim yang kondusif terhadap investasi berbasis digital								
	Pengembangan Sistem Informasi 'Warung Digital'	Tersedianya sistem informasi produk UMKM yang telah diseleksi dan verifikasi yang dapat diakses secara daring							Dinas Koperasi, UMKM, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi
2	Seleksi produk UMKM untuk Warung Digital	Peningkatan jumlah produk UMKM yang telah lolos seleksi untuk diikutsertakan							Dinas Koperasi, UMKM, Ketenagakerjaan, dan

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		dalam Warung Digital							Transmigrasi
3	Pemasaran Produk Warung Digital Berbasis Media Sosial	Peningkatan jumlah social media influencer yang bekerja sama dengan warung digital dalam promosi produk UMKM di media sosial							Dinas Koperasi, UMKM, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi
4	Pemasaran Produk Warung Digital Berbasis Perijinan	Peningkatan jumlah usaha yang menggandeng produk warung digital							Dinas Koperasi, UMKM, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi dan Dinas Penanaman Modal
5	Program Teman Kopi	Peningkatan jumlah produk turunan pertanian berbentuk makan ringan, camilan, dan kudapan							Dinas Koperasi, UMKM, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
G	STRATEGI 7 : Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital								
1	Pengembangan Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bangli							Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	Pengembangan Aplikasi SIPANDU sebagai Extended ID	Peningkatan Jumlah Pelayanan Publik Pada Aplikasi SIPANDU							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Pengembangan layanan informasi perijinan, penataan	Tersedianya sistem informasi pelayanan							Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	ruang, & investasi online	perijinan dan investasi secara online							
4	Pengembangan insentif perijinan dan investasi online	Tersedianya kebijakan insentif perijinan bagi investor yang memohon secara online							Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5	Pengembangan Aplikasi Layanan Kesehatan Terpadu	Tersedianya aplikasi terpadu pelayanan kesehatan Kabupaten Bangli							Dinas Kesehatan
6	Pengembangan Aplikasi Layanan Pendidikan Terpadu	Tersedianya aplikasi terpadu pelayanan pendidikan Kabupaten Bangli							Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
7	Peningkatan kualitas SDM IT Perangkat daerah	Meningkatnya jumlah ASN yang sudah mengikuti pelatihan bidang IT							Badan Kepagawaian dan SDM
8	Peningkatan kualitas SDM IT perangkat desa dan kelurahan	Meningkatnya jumlah perangkat desa dan kelurahan yang sudah mengikuti pelatihan bidang IT							Badan Kepagawaian dan SDM
9	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik tingkat desa	Tersedianya sistem informasi pelayanan publik tingkat desa							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
10	Pengembangan sistem informasi subak	Tersedianya sistem informasi Subak							Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Pengembangan sistem informasi desawisata digital	Tersedianya sistem informasi desa wisata							Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
H	STRATEGI 8 : Mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara nyata oleh masyarakat dalam pelayanan publik strategis								
1	Sosialisasi sistem informasi perangkat daerah	Terlaksananya 2 kali sosialisasi sistem informasi perangkat daerah pada seluruh kecamatan							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
2	Alih Pengetahuan dan Teknologi Petani Jejaring Provinsi	Terlaksananya studi banding pertanian dengan kelompok Tani di Di Desa Gobleg Buleleng							Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
3	Alih Pengetahuan dan Teknologi Perijinan dan Investasi Jejaring Provinsi dan Nasional	Terlaksananya studi banding Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta							Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4	Integrasi pelayanan dasar dalam sistem informasi perangkat daerah	Peningkatan persentase data yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi perangkat daerah							Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA